

Tabel 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kab. Pasaman (sebelum perubahan renstra)

No.	Indikator Kinerja	Target Renstra					Realisasi Capaian Renstra					Rasio Capaian Renstra (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase pemanfaatan potensi sumberdaya alam terbarukan	62,92%	70%	80%	90%	100%	62,92%	0	0	0	0	100	0	0	0	0
2	Persentase Tingkat ketersediaan data dan informasi potensi sumberdaya alam	70%	80%	85%	90%	100%	53	0	0	0	0	75,7	0	0	0	0
3	Indeks kepuasan masyarakat	3	3	3,1	3,2	3,4	2,92	0	0	0	0	97,33	0	0	0	0
4	Tingkat sinergitas informasi dan pelayanan publik	30	45	70	35	100	50	0	0	0	0	100	0	0	0	0
5	Terbangunnya jaringan kerja pelayanan perizinan	1	1	2	2	2	1	0	0	0	0	100	0	0	0	0
6	Persentase Izin sesuai waktu	75	80	85	85	90	80	0	0	0	0	100	0	0	0	0
7	Jumlah Investor (PMDN/PMA)	7	8	8	10	12	7	0	0	0	0	100	0	0	0	0
8	Jumlah Investasi PMA	0	\$ 20.000	\$ 20.000	\$ 30.000	\$ 30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Jumlah Investasi PMDN	29.727.000	32.700.000	35.900.000	39.500.000	40.000.000	3.799.452	0	0	0	0	12,78	0	0	0	0
10	Persentase penanganan pengaduan masyarakat	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0
11	Tingkat koordinasi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat	30	50	65	75	90	30	0	0	0	0	100	0	0	0	0

II.2. Sumber Daya

Untuk menjalankan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman dan dalam mencapai tujuannya dilengkapi dengan 31 orang personil dengan komposisi 25 orang aparatur sipil Negara (ASN) dan 1 orang pegawai honor daerah, 5 orang tenaga Kontrak. Dari 31 orang aparatur, 14 orang menduduki jabatan struktural sebagai berikut :

- 1 orang Kepala Dinas (eselon II b)
- 1 orang Sekretaris (eselon III a)
- 3 Kepala Bidang (eselon III b)
- 9 jabatan Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi (eselon IV a)

Secara keseluruhan komposisi Aparatur sipil negara di lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman berdasarkan kualifikasi pendidikannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Komposisi ASN di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman berdasarkan kualifikasi pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Menurut Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Strata 2	1	1	2
2.	Strata 1	12	5	17
3.	Diploma	-	1	1
4.	SLTA	3	2	4
Jumlah		16	9	25

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa kualifikasi pendidikan ASN yang berada di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman belum sesuai dengan formasi persyaratan dan kualifikasi pendidikan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman, diantaranya masih kurangnya tenaga dibidang teknologi informatika/sarjana computer.

Selanjutnya, komposisi ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman berdasarkan pangkat dan golongan dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.2
ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pasaman berdasarkan golongan

No.	Pangkat	Golongan	Jumlah
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	1
2.	Pembina Tk.I	IV/b	2
3.	Pembina	IV/a	4
4.	Penata Tk.I	III/d	5
5.	Penata	III/c	3
6.	Penata Muda Tk.I	III/b	5
7.	Pengatur	II/c	3
8.	Pengatur Muda	II/a	2
Total			25

Dari tabel di atas dapat dilihat komposisi aparatur sipil negara di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman berdasarkan golongan, antara lain:

- Golongan IV sebanyak 7 orang
- Golongan III sebanyak 13 orang
- Golongan II sebanyak 5 orang

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai mana diuraikan diatas, maka dalam pelaksanaannya didukung dengan ketersediaan sumber daya yang ada yaitu :

- a. Sumber daya manusia yang professional dan memiliki kompetensi yang handal dan sesuai.
- b. Tempat, sarana dan prasarana kerja

- c. Pemanfaatan IT yang telah ada pada DPM & PTSP adalah :
- Membangun aplikasi perizinan secara komputerisasi untuk memberikan informasi tentang pengurusan dan penerbitan izin.
 - Mengaktifkan SPIISE (Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik), dimana akses ini langsung pada BKPM-RI di Jakarta.
 - Mempersiapkan informasi DPMPTSP Kota Pasaman melalui website (www.dpmptsp.pasamankab.go.id)
- d. Mekanisme kerja dalam bentuk petunjuk pelaksanaan kerja (SOP) di bidang penanaman modal dan perizinan yang jelas, mudah dipahami dan mudah diakses oleh perseorangan atau badan usaha.
- e. Layanan pengaduan penanaman modal dan perizinan.

Ketersediaan sarana dan prasarana dalam menunjang kelancaran Pelayanan Publik sangatlah diperlukan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman yang berkedudukan di Jl. A. Yani No. 23 Lubuk Sikaping, merupakan lokasi yang mudah diakses oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan perizinan, dan dapat dijangkau oleh angkutan umum karena berada ditengah kota dan dekat tempat-tempat pelayanan publik lainnya.

Dalam rangka untuk memberikan rasa aman dan nyaman terhadap masyarakat, sarana dan prasarana Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman telah dilengkapi dengan Ruang Tunggu yang cukup, tempat parkir kendaraan roda dua maupun roda empat yang aman sehingga customer dapat merasa nyaman dan aman pada waktu mengajukan permohonan izin.

Untuk mendukung kelancaran pelayanan investasi maupun perizinan di DPM & PTSP, walaupun sarana dan prasarana masih belum memadai dan mencerminkan untuk pelayanan public yang baik namun DPMPTSP telah berusaha seoptimal mungkin untuk mencapai pelayanan prima sebagaimana visi organisasi.

II.3. Kinerja Pelayanan

Capaian kinerja, anggaran dan realisasi berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang sebelumnya merupakan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, dijabarkan pada tabel dibawah ini.

II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman mempunyai tantangan dan peluang dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain:

Tantangan:

1. Masyarakat Kabupaten Pasaman yang belum memiliki pengetahuan, gambaran, maupun wawasan yang cukup terkait keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang mengelola kegiatan penanaman modal, pengembangan investasi dan pelayanan seluruh perizinan usaha yang ada di daerah ini ;
2. Sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman yang masih belum memadai, menjadikan ruang gerak yang terbatas bagi aparatur pemerintah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan usaha untuk mengoptimalkan kualitas dan kuantitas pelayanannya kepada masyarakat khususnya bagi para pelaku usaha yang berinvestasi di Kabupaten Pasaman;
3. Belum efektif dan efisiennya kegiatan promosi dan kerjasama yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman sebagai upaya menarik minat calon investor baik tingkat lokal, domestik, maupun mancanegara guna meningkatkan penanaman modal di Kabupaten Pasaman;
4. Masih belum tersedianya Sistem Information Technology (IT Based) yang up to date, akurat dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan informasi bagi calon investor dalam kaitannya dengan penanaman modal di daerah mengingat penggunaan IT (IT based) dalam pelayanan perizinan dapat mendukung percepatan waktu, transparansi dan kemudahan akses bagi masyarakat pengguna layanan;
5. Pelimpahan seluruh kewenangan di bidang perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman juga masih menjadi masalah klasik yang belum selesai. Tarik menarik antara SKPD teknis dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman masih kental mewarnai birokrasi pelayanan perizinan secara umum. Oleh karena itu akselerasi optimal pelayanan perizinan melalui berbagai terobosan belum memberikan hasil yang signifikan.

6. Tuntutan masyarakat khususnya investor akan pelayanan perijinan terpadu yang mudah, cepat dan pasti semakin meningkat serta jaminan ketersediaan informasi yang akurat dan kekinian menyangkut peluang investasi dan kerjasama di Kabupaten Pasaman. Hal tersebut sangat diperlukan oleh Kabupaten Pasaman untuk menarik investasi dalam rangka mendorong pertumbuhan Perekonomian Kabupaten Pasaman.
7. Kualitas Sumber Daya Aparatur (SDA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman perlu terus ditingkatkan agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal, mengikuti semakin tingginya tuntutan masyarakat akan pelayanan perijinan yang mudah, cepat dan pasti

Peluang:

Adapun peluang yang mampu dimanfaatkan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Letak geografis Kabupaten Pasaman yang sangat strategis yang mendukung kepada peningkatan perekonomian masyarakat sehingga dapat mempercepat pembangunan di daerah ini secara signifikan.
2. Tersedianya dasar hukum yang kuat dari Pemerintah Pusat yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengembangkan akses penanaman modal dan aspek perijinan usaha yang ada di daerah dengan seluas-luasnya.
3. Tersedianya jaringan infrastruktur daerah sehingga masih memungkinkan untuk lebih dikembangkan guna meningkatkan gairah usaha para investor di Kabupaten Pasaman.
4. Banyaknya lahan yang belum dimanfaatkan masyarakat sehingga dapat menjadikan modal daerah untuk menarik minat para investor yang ingin mengembangkan usahanya di Kab. Pasaman.
6. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang semakin pesat membuka peluang bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman untuk lebih mengakselerasi, berinovasi dan mengembangkan pelayanan perijinan terpadu agar lebih efisien dan efektif bagi masyarakat dalam mengurus perijinan dengan lebih mudah dan lebih cepat.

8. Ketersediaan sumber daya alam yang potensial, berupa hutan, lahan pertanian, pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan, bahan tambang (panas bumi, emas, biji besi, dan batuan mineral lainnya) serta potensi pariwisata baik wisata alam maupun wisata budaya. Untuk dapat menggerakkan roda pembangunan secara mandiri dan efisien, tentunya diperlukan daya dukung sumber daya alam yang memadai. Sumber daya alam ini akan menjadi modal dasar untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Pasaman

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Era globalisasi mengajak semua negara termasuk Indonesia untuk melakukan pembenahan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karenanya dalam menghadapi perekonomian global, dirasa perlu menyesuaikan peraturan – peraturan yang ada di bidang penanaman modal dan bidang perizinan dengan maksud menciptakan iklim pemasaran modal yang kondusif, promotif, memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha. Atas dasar hal tersebut maka diterbitkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Permendagri nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Presiden RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang terbaru diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman seperti yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya bahwa pada prinsipnya fungsi pelayanan melekat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman. Pelayanan ini mencakup seluruh aspek menurut tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman. Atas dasar tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman dan hasil evaluasi pelaksanaannya, teridentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Pelayanan

Capaian:

- Penyebarluasan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistim informasi namun tidak dapat diakses publik
- Sumberdaya manusia yang profesional masih terbatas

Faktor yang mempengaruhi

a. Secara internal:

- Ketersediaan sistem informasi pelayanan perizinan, non perizinan, dan penanaman modal masih dalam cakupan internal atau belum dapat diakses oleh publik
- Keterbatasan anggaran dan sumberdaya manusia menyebabkan tidak optimalnya pemanfaatan sistem informasi.
- Belum terpenuhinya pelaksanaan diklat teknis terhadap sebagian aparatur

b. Secara eksternal

- Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam pengurusan perizinan dan lainnya
- Rendahnya pemahaman masyarakat/perusahaan tentang prosedur dan persyaratan Perizinan
- Rendahnya pemahaman masyarakat/perusahaan tentang tata ruang dan kaitannya dengan Perizinan
- Citra pelayanan birokrasi pemerintah terhadap penerbitan perizinan terhadap investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Pasaman yang belum optimal
- Belum optimalnya oleh publik penggunaan sarana aspirasi

2. Data dan informasi

Capaian:

- Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi

Faktor yang mempengaruhi

a. Secara internal:

- Belum tersedianya dokumen kajian potensi dan peluang investasi secara keseluruhan atau masih terbatas untuk beberapa potensi
- Belum tersedianya data potensi dan peluang investasi secara menyeluruh (database potensi dan peluang investasi)
- Tidak adanya pemetaan terhadap potensi unggulan, sehingga minimnya ketersediaan informasi yang terupdate
- Belum tersedianya sarana informasi dalam menampung partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha terkait dengan potensi

b. Secara eksternal

- Belum terbangunnya partisipasi aktif masyarakat untuk ikut serta dalam pemberian informasi terkait dengan potensi

3. Promosi

Capaian:

- Belum optimalnya publikasi potensi dan peluang investasi daerah

Faktor yang mempengaruhi

a. Secara internal:

- Belum tersedianya secara optimal sarana promosi daerah yang berbasis sistem aplikasi dan terpublikasi secara luas
- Belum optimalnya keikutsertaan promosi yang dilaksanakan, baik yang disebabkan karena sebelumnya tidak tersedia anggaran pelaksanaan promosi juga keterbatasan penyediaan data dan informasi potensi dan peluang investasi daerah
- Masih rendahnya tingkat promosi kekayaan sumber daya yang ada di Pasaman terhadap investor swasta sehingga berdampak terhadap kecilnya peluang usaha yang ada

b. Secara eksternal

- Belum terbangunnya partisipasi aktif masyarakat untuk ikut serta dalam penyebarluasan informasi terkait dengan potensi

4. Sosialisasi

Capaian:

- Belum optimalnya sosialisasi yang dilaksanakan

Faktor yang mempengaruhi

c. Secara internal:

- Masih rendahnya volume pelaksanaan sosialisasi
- Dukungan Anggaran yang terbatas

d. Secara eksternal

- Rendahnya partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan sosialisasi

III.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Pasaman tidak terlepas dari akumulasi seluruh capaian Visi dan Misi perangkat daerah (SOPD) yang telah ditetapkan, artinya bahwa pencapaian masing-masing SOPD berakumulasi dalam pencapaian Misi yang telah ditetapkan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman merujuk kepada pencapaian misi kelima RPJMD perubahan Kabupaten Pasaman 2016-2021 yakni "Menyelenggarakan pemerintahan yang baik, bersih dan terpercaya". Penjabaran permasalahan dan faktor penghambat program dari misi ini yang disesuaikan dengan tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman adalah:

1. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

Menciptakan kenyamanan berinvestasi perlu didukung dengan berbagai komponen, terutama ketersediaan data dan informasi yang akurat, pelayanan dan fasilitasi penanaman modal. Kondisi saat ini, kajian-kajian tidak tersedia secara optimal untuk semua sektor unggulan. Selain itu dukungan publik terutama masyarakat belum optimal dikarenakan masih terdapat adanya beberapa potensi yang terkendala terhadap pembebasan lahan. Untuk itu perlu dioptimalkan pelaksanaan sosialisasi untuk dapat memfasilitasi kerjasama investasi dengan baik antara dunia usaha dan masyarakat.

2. Program peningkatan dan pengembangan pelayanan perizinan

Permasalahan pelayanan perizinan ini mencakup penyebarluasan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistim informasi yang telah dilaksanakan sampai saat sekarang ini. namun akibat minimnya pengetahuan publik mengenai informasi perizinan, non perizinan, dan penanaman modal. Ini disebabkan karena keterbatasan anggaran dan sumberdaya manusia menyebabkan tidak optimalnya sosialisasi sistim informasi. Selain itu, masih belum terpenuhinya pelaksanaan diklat teknis aparatur menjadi salah satu faktor yang menentukan pengembangan pelayanan.

3. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi

Terkendalanya publikasi disebabkan belum optimalnya ketersediaan data dan informasi. Data dan informasi mencakup dokumen kajian terhadap potensi dan peluang investasi secara keseluruhan atau masih terbatas pada beberapa potensi saja untuk saat ini. Dengan ketersediaan data dan informasi nantinya akan mengoptimalkan keikutsertaan dalam penyelenggaraan publikasi.

III.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Ketentuan pemanfaatan pengendalian ruang perlu dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pemberian perizinan sehingga pembangunan di Kabupaten Pasaman selaras dengan struktur dan pola ruang. Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasaman dijadikan pedoman dalam pemberian perizinan yang menjadi wewenang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Pasaman.

Dalam hal pemberian perizinan sesuai dengan kewenangannya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Pasaman mengacu/ mengikuti ketentuan perizinan yang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang telah ditetapkan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan program.

Terkait dengan isu lingkungan, program pemanfaatan ruang dari kebijakan pembangunan daerah penataan ruang memiliki dampak negatif terhadap isu strategis degradasi lingkungan. Untuk mengurangi dampak negatif maka dalam pelaksanaan pemberian perizinan sesuai dengan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Pasaman akan berpedoman pada ketentuan pemanfaatan pengendalian ruang dari RTRW Kabupaten Pasaman.

III.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Setelah dilakukan review terhadap permasalahan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pasaman yang mempengaruhi pelayanan maka dapat dikemukakan isu strategis terkait dengan tugas pokok dan fungsi DPMPSTP Kab. Pasaman antara lain :

1. Akurasi data dan informasi

Ketersediaan data dan informasi menjadi salah satu factor pendukung penanaman modal di Kabupaten Pasaman, minimnya data potensi dan peluang investasi dan kajian-kajian seperti study kelayakan dan semacamnya menjadikan potensi sulit dipublikasikan, mengingat dunia usaha menganut prinsip ekonomi yang tentunya membutuhkan akurasi data untuk kebutuhan analisa financial

2. Peran serta public

Minimnya peran serta public menjadikan potensi daerah sulit untuk di indentifikasi, dengan mengoptimalkan pelaksanaan sosialisasi akan dapat mendukung membangun peran serta aktif masyarakat terutama kemudahan dalam pembebasan lahan, pentingnya membangun peran serta public membawa dampak terhadap kenyamanan investasi.

3. Sumber daya manusia

Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memahami masalah penanaman modal dan perizinan, serta tenaga ahli dibidang teknologi informatika yang akan mengelola system informasi perizinan berbasis online